



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHA AYU TIMORNIYATI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 689018

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.380.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 629 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/100 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 1.860 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 165.500.000**

1. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MOPEN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 162.367.500**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 117.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	1.824.867.500
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.824.867.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.